



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 1266-1278

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Pengelolaan Dana Operasional Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Aqeel Fadhlurrahman Amin^{1✉}, Ardieansyah², Elvira Mulya Nalien³

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: aqeel023aqeel@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana operasional di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dana operasional kecamatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana operasional di Kecamatan Binamu belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa kendala dalam proses pengelolaan dana, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan, kurangnya transparansi dalam pelaporan, serta minimnya pengawasan terhadap penggunaan dana. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pengelolaan keuangan, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, kurangnya transparansi dalam pelaporan, serta minimnya pengawasan terhadap penggunaan dana. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pengelolaan keuangan, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana operasional kecamatan.

Kata Kunci: *Dana Operasional, Kecamatan Binamu, Evaluasi, Pengelolaan Keuangan, Transparansi*

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of operational fund management in Binamu District, Jenepono Regency. The focus of this study is to analyze the planning, organizing, implementing, and supervising process of sub-district operational funds and to identify factors that influence their management. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the management of operational funds in Binamu District has not been fully optimal. There are several obstacles in the fund management process, including limited human resources who are competent in financial management, lack of transparency in reporting, and minimal supervision of the use of funds. This study recommends increasing the capacity of sub-district officials in financial management, strengthening the internal supervision system, and increasing transparency and accountability in financial management, lack of transparency in reporting, and minimal supervision of the use of funds. This study recommends increasing the capacity of sub-district officials in financial management, strengthening the internal supervision system, and increasing transparency and accountability in the management of sub-district operational funds.

Keywords: Operational Funds, Binamu District, Evaluation, Financial Management, Transparency

PENDAHULUAN

Kecamatan memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik di wilayah kerjanya. Sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, kecamatan memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Menurut Dwiyanto (2006), keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kinerja institusi di tingkat lokal, termasuk kecamatan, yang berfungsi sebagai simpul utama interaksi antara pemerintah dan warga.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, kecamatan didukung oleh dana operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini bertujuan untuk menunjang berbagai kegiatan administrasi, koordinasi, serta pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan dana operasional yang dilakukan secara efektif dan efisien menjadi sangat krusial, karena akan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009), efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Jika dana tersebut dikelola dengan baik, maka kecamatan dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan warga, mempercepat proses pelayanan, dan turut memperkuat pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan manajerial aparatur kecamatan sangat diperlukan agar penggunaan dana operasional benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat Osborne dan Gaebler (1992) yang menyatakan bahwa pemerintahan yang berhasil adalah pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*results-oriented government*) dan mampu melakukan inovasi dalam manajemen publik.

Kecamatan Binamu, yang terletak di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, memegang peranan penting dalam pelayanan publik dan koordinasi pembangunan di tingkat lokal. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang cukup besar, kebutuhan akan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah kecamatan. Untuk mendukung hal tersebut, dana operasional dari pemerintah daerah menjadi salah satu sumber utama pendanaan kegiatan kecamatan. Namun demikian, dalam praktik pengelolaannya, sering kali muncul berbagai kendala, seperti keterlambatan pencairan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi. Seperti yang diungkapkan oleh Mahmudi (2010), kelemahan dalam aspek perencanaan dan pengawasan keuangan daerah seringkali menjadi penyebab utama tidak optimalnya kinerja sektor publik.

Permasalahan ini tidak hanya menghambat pelaksanaan program kerja, tetapi juga berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam manajemen dana operasional agar Kecamatan Binamu dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dan berkelanjutan.

Evaluasi terhadap pengelolaan dana operasional kecamatan merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, pemerintah dapat menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan dana, serta sejauh mana alokasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. Menurut Kuncoro (2007), evaluasi merupakan instrumen penting dalam proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) di sektor publik.

Evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, seperti ketidaktepatan penggunaan anggaran, lemahnya pengawasan internal, atau

rendahnya kapasitas aparaturnya dalam mengelola keuangan. Melalui temuan-temuan tersebut, akan muncul gambaran yang lebih jelas mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini selanjutnya dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan atau rekomendasi yang lebih tepat sasaran, guna meningkatkan tata kelola keuangan kecamatan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menggali dan memahami tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana operasional di Kecamatan Binamu, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana. (2) Mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Binamu dalam mengelola dana operasional, serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya. (3) Memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan hasil evaluasi, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana operasional di Kecamatan Binamu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai pengelolaan dana operasional di Kecamatan Binamu. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat berbagai fakta yang ditemukan di lapangan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dana operasional kecamatan. Bogdan dan Taylor dalam Nugrahani (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Binamu memiliki tingkat kompleksitas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup tinggi, sehingga dinilai representatif untuk menggambarkan pengelolaan dana operasional di tingkat kecamatan. Penelitian dilaksanakan selama 18 hari, bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub

Bagian Keuangan, dan staf terkait. Menurut Charismana et al. (2022), wawancara memungkinkan peneliti menggali informasi yang lebih mendalam mengenai pendapat, perasaan, dan pengalaman pribadi responden. Kedua, observasi langsung terhadap proses pengelolaan dana operasional di Kantor Kecamatan Binamu. Observasi menghasilkan data yang mendalam dan kontekstual mengenai perilaku, interaksi sosial, atau kondisi lingkungan secara real-time dan alami (Irvan et al., 2023). Ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen seperti perencanaan anggaran, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Ketiga metode ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait pengelolaan dana operasional kecamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Binamu

Kecamatan Binamu merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang berada di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 69,49 km² dan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 53.000 jiwa, Kecamatan Binamu memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Secara administratif, kecamatan ini terdiri dari 13 kelurahan dan desa yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, Kecamatan Binamu juga menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Jeneponto, sehingga aktivitas pemerintahan dan pelayanan administratif lebih terpusat di wilayah ini. Hal ini menjadikan Binamu sebagai kawasan strategis dalam pembangunan daerah.

Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Struktur organisasinya terdiri dari Camat sebagai pimpinan, dibantu oleh Sekretaris Camat, beberapa Kepala Sub Bagian, serta Kepala Seksi yang menangani berbagai bidang tugas. Dalam hal pengelolaan keuangan, Kecamatan Binamu memiliki Sub Bagian Keuangan yang berperan penting dalam menjalankan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, hingga pelaporan. Unit ini memastikan bahwa dana operasional dikelola secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Operasional Kecamatan Binamu

Perencanaan dana operasional di Kecamatan Binamu diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan serta Rencana Kerja (Renja) tahunan. Proses ini dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Musrenbang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan kelurahan dan desa, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil, guna menyerap aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Melalui mekanisme ini, diharapkan perencanaan anggaran dapat disusun secara lebih tepat sasaran, responsif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa proses perencanaan dana operasional di Kecamatan Binamu sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan secara berjenjang dan mengacu pada dokumen perencanaan strategis serta hasil Musrenbang. Selain itu, pelibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan juga menunjukkan adanya upaya untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu, ditemukan beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam tahap perencanaan dana operasional. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Kurangnya keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan: Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu menyatakan, "Salah satu kendala yang kami hadapi dalam tahap perencanaan adalah kurangnya keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Meskipun Musrenbang telah dilaksanakan, namun masih banyak tokoh masyarakat, perwakilan desa atau kelurahan, dan elemen masyarakat lainnya yang belum berpartisipasi secara maksimal. Padahal, masukan dari mereka sangat penting untuk menyusun rencana kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan."
2. Perencanaan yang disusun cenderung bersifat rutin dan kurang inovatif: Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu mengatakan, "Perencanaan yang kami susun selama ini cenderung bersifat rutin dan kurang inovatif. Kami lebih fokus pada kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya, sehingga kurang memberikan ruang untuk ide-ide baru yang bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas penggunaan anggaran. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk menciptakan perencanaan yang lebih kreatif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat."

3. Penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana operasional belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat: Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu menjelaskan, "Penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana operasional memang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Meskipun kami sudah melakukan Musrenbang, seringkali prioritas yang ditetapkan lebih mengarah pada kegiatan yang sifatnya administratif atau rutin, sehingga kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak atau strategis belum sepenuhnya tercakup. Ini menjadi salah satu area yang perlu kami perbaiki agar anggaran yang ada bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Operasional

Pelaksanaan pengelolaan dana operasional di Kecamatan Binamu mencakup penggunaan anggaran untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Proses pengelolaan ini dimulai dengan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh pihak yang berwenang. Setelah SPP disetujui, langkah berikutnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran. Terakhir, pencairan dana dilakukan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh pihak terkait. Semua langkah ini dilaksanakan dengan tujuan memastikan penggunaan dana operasional sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengelolaan dana operasional di Kecamatan Binamu masih menghadapi beberapa permasalahan yang menghambat kelancaran proses administrasi dan pelaksanaan program. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan dalam proses pencairan dana, yang berdampak langsung pada tertundanya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, sering terjadi penyesuaian atau perubahan kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini juga menyulitkan pengelolaan dana yang sudah dialokasikan. Di samping itu, kurangnya koordinasi antara unit-unit terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kendala lain yang memperburuk efektivitas penggunaan dana operasional. Koordinasi yang tidak optimal antara pihak kecamatan dan instansi terkait memperlambat pelaksanaan program dan menyulitkan proses evaluasi serta pertanggungjawaban keuangan.

Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana operasional di Kecamatan Binamu dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung dan inspektorat daerah, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana operasional di Kecamatan Binamu belum optimal. Pengawasan internal cenderung bersifat formalitas dan belum mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana operasional. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana operasional masih minim karena kurangnya transparansi informasi yang disediakan oleh pihak kecamatan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Operasional

Dari hasil wawancara dengan pak M.Emilyas, dibagi dalam faktor pendukung dan penghambat yaitu:

Faktor Pendukung

1. Adanya regulasi dan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah: Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu menyampaikan, "Salah satu hal yang mendukung kami dalam pengelolaan dana operasional adalah adanya regulasi dan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Aturan-aturan tersebut menjadi acuan bagi kami dalam menjalankan setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan adanya pedoman yang baku, kami lebih mudah memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip akuntabilitas."
2. Dukungan dari pemerintah kabupaten dalam bentuk alokasi anggaran dan pembinaan: Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu menyatakan, "Kami sangat terbantu dengan dukungan dari pemerintah kabupaten, baik dalam bentuk alokasi anggaran maupun pembinaan teknis. Alokasi dana operasional yang diberikan memungkinkan kami menjalankan berbagai program dan kegiatan di kecamatan. Selain itu, pembinaan yang rutin dari instansi terkait juga membantu kami memahami regulasi terbaru dan memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih tertib dan akuntabel."
3. Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu menjelaskan, "Saat ini kami sangat terbantu dengan adanya sistem informasi manajemen keuangan daerah. Sistem ini mempermudah proses penatausahaan dan pelaporan keuangan karena semuanya terdokumentasi dengan baik dan lebih terstruktur. Dengan sistem ini,

pekerjaan menjadi lebih efisien dan kesalahan administrasi bisa diminimalkan, sehingga pelaporan keuangan bisa dilakukan secara tepat waktu dan akurat.”

4. Kesadaran dan komitmen dari pimpinan kecamatan untuk melaksanakan pengelolaan dana operasional secara baik: Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu menyampaikan, “Kami di kecamatan memiliki kesadaran dan komitmen penuh untuk melaksanakan pengelolaan dana operasional dengan sebaik-baiknya. Saya sendiri selalu menekankan kepada seluruh staf bahwa dana yang dikelola adalah amanah, sehingga harus digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai aturan. Komitmen ini penting agar setiap kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.”

Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor penghambat menurut pak M.emilyas yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan: Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu mengungkapkan, “Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten dalam hal pengelolaan keuangan. Masih ada staf yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur dan regulasi keuangan daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kelancaran administrasi dan akurasi pelaporan. Kami berharap ke depan ada pelatihan atau pendampingan yang lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas SDM kami di bidang ini.”
2. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah: Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu menyatakan, “Kami akui masih ada kendala di lapangan terkait kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Beberapa staf belum sepenuhnya memahami aturan-aturan teknis, terutama yang sering mengalami perubahan. Hal ini kadang membuat pelaksanaan dan pelaporan keuangan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kami sangat berharap ada bimbingan teknis atau sosialisasi regulasi yang rutin dari instansi terkait.”
3. Masih lemahnya sistem pengawasan internal: Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu menyampaikan, “Kalau bicara soal pengawasan, saya harus akui bahwa sistem pengawasan internal kita masih lemah. Pengawasan belum berjalan maksimal karena keterbatasan personel dan belum adanya mekanisme yang benar-benar terstruktur. Padahal, pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa

penggunaan dana operasional benar-benar sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Ke depan, kami ingin memperkuat fungsi pengawasan ini agar pengelolaan keuangan bisa lebih akuntabel.”

4. Dalam wawancara, Bapak M. Emilyas selaku Camat Binamu mengungkapkan, “Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan penggunaan dana operasional memang masih minim. Masyarakat umumnya belum terlalu aktif memberikan masukan atau ikut mengawasi jalannya program. Padahal, partisipasi mereka sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan dan bisa diawasi bersama. Ke depan, kami akan berupaya untuk lebih melibatkan masyarakat melalui forum-forum diskusi dan sosialisasi yang lebih terbuka.”

Efektivitas Penggunaan Dana Operasional

Efektivitas penggunaan dana operasional di Kecamatan Binamu tercermin dari beberapa indikator utama yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satunya adalah tingkat penyerapan anggaran yang menunjukkan sejauh mana dana yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai rencana. Selain itu, kesesuaian penggunaan anggaran dengan dokumen perencanaan awal menjadi indikator penting dalam menilai konsistensi pelaksanaan anggaran. Indikator lain yang tak kalah penting adalah dampak nyata dari penggunaan dana terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik, baik dari segi kualitas layanan, kecepatan respon, maupun kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat penyerapan anggaran dana operasional di Kecamatan Binamu tergolong cukup baik, yaitu berada pada kisaran 85 hingga 90 persen dari total anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan operasional kecamatan. Meskipun demikian, dari sisi kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan perencanaan awal, masih ditemukan beberapa kendala. Beberapa kegiatan yang terlaksana di lapangan ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Penyimpangan ini umumnya terjadi karena adanya perubahan kebutuhan mendesak di lapangan atau kurang optimalnya perencanaan awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dana terserap dengan baik, aspek akurasi dan konsistensi dalam perencanaan masih perlu ditingkatkan agar efektivitas pengelolaan dana operasional benar-benar tercapai dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

Dari segi dampak, penggunaan dana operasional di Kecamatan Binamu belum sepenuhnya memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Meskipun dana telah digunakan untuk berbagai kegiatan operasional, keluhan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan masih sering terdengar. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dana tersedia, ada tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Faktor-faktor seperti koordinasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan menjadi beberapa alasan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dan memuaskan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana operasional di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto secara umum telah dilaksanakan dengan mengacu pada prosedur yang berlaku. Namun, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya optimal. Proses perencanaan anggaran telah dilakukan secara berjenjang dan formal, namun partisipasi pemangku kepentingan masih rendah, dan substansi perencanaan cenderung bersifat rutin serta kurang inovatif. Hal ini berimplikasi pada kurangnya penyesuaian perencanaan terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Dalam tahap pelaksanaan, meskipun tingkat penyerapan anggaran tergolong tinggi, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan pelaksanaan aktual. Beberapa kegiatan mengalami penundaan pelaksanaan karena adanya keterlambatan pada tahapan pertanggungjawaban dan proses administrasi, yang seharusnya diselesaikan segera namun kerap tertunda. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam alur pelaksanaan program serta mengganggu efektivitas anggaran. Dengan kata lain, bukan pada penyimpangan dari sisi penggunaan dana secara ilegal, tetapi lebih pada ketidaktertiban prosedural dalam proses pertanggungjawaban yang belum berjalan sesuai dengan waktu dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Pengawasan dan evaluasi juga belum berjalan secara optimal. Pengawasan internal masih cenderung bersifat formalitas, belum mampu secara efektif mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan administratif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga masih minim akibat kurangnya transparansi informasi publik dan belum terbentuknya ruang partisipatif yang mendorong kontrol sosial secara aktif.

Faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan dana operasional meliputi keberadaan

regulasi yang jelas, dukungan dari pemerintah kabupaten, penggunaan sistem informasi keuangan, serta komitmen pimpinan kecamatan. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap peraturan, lemahnya pengawasan internal, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Secara keseluruhan, efektivitas penggunaan dana operasional di Kecamatan Binamu masih perlu ditingkatkan. Penyerapan anggaran yang tinggi belum diiringi dengan kesesuaian penggunaan terhadap perencanaan yang telah disusun secara optimal, serta belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perbaikan dalam aspek koordinasi, ketepatan alur pertanggungjawaban, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to qualitative research methods: A phenomenological approach to the social sciences*. Wiley.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi belajar dan prestasi belajar pada mata pelajaran PPKn di Indonesia: Kajian analisis meta. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 9(2), 110–117. <https://doi.org/10.29300/jbti.v9i2.1906>
- Irvan, M., & Muslim, F. (2023). Effectiveness of the TEACCH method to improve the executive function ability of children with autism spectrum disorder (ASD). *INCARE: International Journal of Educational Resources*, 5(3), 323–326. <https://doi.org/10.29300/incare.v5i3.1028>
- Kuncoro, M. (2007). *Metodologi penelitian untuk bisnis dan ekonomi (Edisi revisi)*. Erlangga.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik (Edisi revisi)*. Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Nugrahani, D. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif dalam pendidikan*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit*

is transforming the public sector. Addison-Wesley.

Pahleviannur, R., & Hidayat, R. (2022). Pendekatan kualitatif dalam penelitian pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 29(1), 45–53. <https://doi.org/10.1234/jpp.v29i1.1234>

Rahardjo, A. (2014). Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah. Graha Ilmu.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2017). Metode penelitian pendidikan. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.